

# MENGEMAS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

*Ahmad Ta'rifin\**

**Abstract:** The school has an urgent function and special mission to create moral beings, which are formed according to community needs. Although the family is the most appropriate and effective in generating and managing the underlying feelings which are simple and be the foundation of morality, however, the family is not an institution that is founded with the goal of educating children to be able to meet the demands of society. At this stage of schools- especially primary schools - this is the moral education of children began to be given, although the material provided is still common. Conversely, when the stage of primary school age went by without laying the foundations of morality, that foundations of morality will never be implanted in the child. In its implementation, the moral education in schools will be effective if there is any «model» and the consistency of the educators. Attitudes and behaviors of educators, especially honesty, as the mirror of character is not possible to be camouflaged, because actually, it is a process of delivering the most effective moral values. Therefore, honesty is the base of truth and righteousness which is the essence of moral values.

**Kata Kunci:** moral, pendidikan moral, sekolah

## MEMAKNAI MORAL

Kata moral berasal dari Latin *mores*, jamak dari kata *mos* yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Arab, dipakai kata *akhlak* yang mempunyai beberapa makna, yaitu: tabiat, perangai, adat istiadat, dan perilaku (Mansyur

---

\* *Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Jl.Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, e-mail: tarifinahmad4@gmail.com*

Ali Rajab, 1983: 11). Dalam *Bamus Besar Bahasa Indonesia*, moral juga diartikan sama dengan susila atau budi pekerti yakni penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan tingkah laku (Poerwadarminta, 1991). Secara terminologi, moral adalah sesuainya tindakan manusia dengan ide-ide umum yang diterima, mana yang baik dan wajar baik yang datang dari Tuhan maupun manusia (Lihat Hamzah Ya'kub, 1972: 311).

Moral atau akhlak merupakan esensi dari semua ajaran yang diturunkan Tuhan, sehingga dalam konteks ini, banyak para tokoh agama yang memberikan definisi tentang hal ini. Ibnu Miskawaih (932- 1030 M) dan Al-Ghazali (1058-1111 M), dua tokoh pendidikan Islam misalnya, menyebut akhlak sebagai sikap batin yang mampu mendorong manusia secara spontan untuk melakukan suatu kebaikan tanpa adanya pertimbangan lebih dahulu.

Dalam pengertian umum, moral adalah hal yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip pertimbangan tentang yang benar dan salah dalam kaitannya dengan prilaku atau karakter manusia. (Abd Hasim, 2000). Dalam konteks pendidikan, entitas pendidikan moral berarti guru menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran serta mampu mendemonstrasikannya melalui sikap dan prilaku tentang kebaikan dan kebenaran dari karakter dan tingkah laku manusia. Idealnya, guru harus mampu “mempersonifikasikan” nilai-nilai moral pada sikap dan tingkah lakunya (Abdul Hasim, 2000). Bila hal itu terwujud, maka tujuan pendidikan moral yakni melahirkan suatu perbuatan dan tindakan yang baik peserta didik niscaya terwujud.

Oleh karena moral juga bersangkut paut dengan aspek psikologis dan bersandar pada keyakinan (perasaan hati tentang benar dan salah), maka membangun moral peserta didik tidaklah semudah membangun pengetahuannya. Dengan kata lain, pendidikan moral atau akhlak perlu waktu, kontinuitas (*keistiqamahan*) dan kerjasama dengan pranata pendidikan lainnya, yakni keluarga dan masyarakat.

Dengan pengertian dan pemahaman demikian, dapat disimpulkan, moral merujuk kepada perasaan, sikap, dan tanggung jawab yang berlandaskan pada pertimbangan benar-salah yang didasari keyakinan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, bahwa keluhuran budi pekerti manusia itu menunjukkan sifat batin manusia, seperti kesadaran tentang kesucian, kemerdekaan, keadilan, ketuhanan, cinta kasih, kedamaian, sosialisme dan sebagainya. Sifat batin tersebut hendaknya dimiliki setiap peserta didik sebagai dasar dan pedoman prilaku keseharian mereka. Kemudian, perilaku bermoral

atau tidak, sangat ditentukan oleh sikap dan keyakinan atas kebenaran atau kebajikan dari peserta didik sendiri. Karenanya pemahaman tentang moral, transformasi dan internalisasi nilai-nilai moral dalam proses pendidikan adalah suatu keharusan (Syaukani HR, 2006: 112-13).

## **PROBLEMATIKA PENDIDIKAN MORAL**

Pendidikan moral adalah bimbingan lahir-batin secara bulat dan utuh untuk mencapai kesempurnaan kepribadian manusia, yang dapat dimanifestasikan dalam wujud perangai, kata-kata dan perbuatan untuk dirinya dan untuk orang lain atas dasar suara hati yang jujur dan benar. Pendidikan moral dalam kehidupan manusia, terlaksana secara kodrati, yakni dilakukan oleh orang-orang dewasa atas nilai-nilai baku yang berlaku umum dan berlaku khusus dalam lingkungan sosial tertentu. Dalam budaya Indonesia, pendidikan moral alamiah tersebut sering tertuang dalam petuah-petuah orang tua dan orang-orang tua (Abd.Hasim, 2000).

Sementara itu, dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, dimensi moral mendapat kedudukan penting. Hal ini dapat dilihat dalam arah dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan di Indonesia seperti tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 disebutkan sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dari rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut ditegaskan bahwa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan sistem nilai yang sejati dan harus dianut oleh setiap pendidik. Sikap dan perilaku para pendidik yang dilandasi iman dan takwa ini diharapkan berpengaruh kepada diri para peserta didik, baik melalui *transfer of knowledge* maupun melalui *building of character*.

Persoalannya, muatan moral dalam tujuan pendidikan di atas terkesan hanya berlaku pada tataran normatif saja. Hal ini bisa dilihat dari berbagai tindak amoral yang bisa menggelinding menuju dekadensi moral dalam dunia

pendidikan Indonesia. Pada tingkat lanjut, kegagalan moral dalam dunia pendidikan menjadi perlambang kegagalan pendidikan nasional dalam merealisasikan fungsi dan tujuan pendidikannya.

Sekedar menyebut contoh, tawuran antar pelajar, seks bebas di areal kampus dan kost mahasiswa, pembajakan kendaraan umum, kasus bunuh diri siswa-siswi yang gagal UN, perkelahian massal dan demonstrasi mahasiswa yang tidak santun adalah bukti kegagalan pendidikan dalam meningkatkan kualitas moral peserta didik.

Contoh kegagalan lain yang memprihatinkan dunia pendidikan adalah kasus masuknya narkoba ke lingkungan pendidikan dasar (SD/MI) pada medio tahun 1999, yang menurut Mendiknas ketika itu, Yuwono Sudarsono bisa menyebabkan, “kehilangan satu generasi, jika persoalan ini tidak segera ditangani.” (Media Indonesia, 30/12/1999) Menurut catatan Ditjen Dikdasmen pada tahun 1999, dari 45 juta anak usia sekolah, sekitar 2 juta disinyalir terlibat dalam kasus-kasus narkoba.

Sementara itu, laporan yang disampaikan oleh Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Indonesia sudah melebihi ambang batas, yakni 10 kali lipat dari angka standar internasional. Pihak Depdiknas bahkan meyakini jumlah pecandu narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa bisa mencapai angka 15 sampai 20 kali lipat! (Media Indonesia, 30/12/1999).

Kegagalan pendidikan tidak hanya di lingkungan persekolahan saja, tetapi merambah ke seluruh dimensi bangsa ini. Guru Besar Filsafat UI, Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo menyatakan, bangsa Indonesia saat ini benar-benar sedang menghadapi dekadensi budaya dan dekadensi moral. Nilai-nilai bangsa Indonesia yang dipupuk dalam tradisi dan sejarah perjalanan bangsa ini tersapu bersih oleh penguasa rezim Orde Baru yang kontra moral: ambisi terhadap jabatan, kekayaan, kedudukan dan kehormatan serta serakah untuk terus berkuasa. Bangsa Indonesia saat ini tidak hanya mengalami proses pendangkalan nilai yang dimiliki, dihayati dan dijunjung tinggi, tetapi juga tengah mengalami pergeseran fungsi dan kedudukan nilai tersebut. Privasi, ketenangan, interaksi dan keamanan masyarakat yang dulu berjalan dengan baik kini dirasakan semakin hambar, rawan terhadap kekerasan, kecemasan terhadap kerusuhan dan rasa tidak aman lagi (Khaerudin Kurniawan, 1999).

Dekadensi moral juga tercermin dalam sikap dan perilaku anggota masyarakat yang tidak dapat menghargai harkat dan martabat orang lain. Biasanya, seseorang lebih suka memaksakan hak dirinya kepada orang lain atau sebaliknya terlalu bebas memanfaatkan haknya tanpa menghiraukan yang lain. Padahal, hak dan kebebasan seseorang dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Interaksi dalam kehidupan di masyarakat menjadi hanya sebuah kamufase dan simbolisme belaka.

Berbagai tindak kekerasan dan perilaku amoral tersebut disinyalir akar permasalahannya adalah "hilangnya" dimensi budi pekerti atau moral dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, wacana yang mengemuka beberapa tahun belakangan ini adalah perlunya budi pekerti diajarkan kembali di dunia pendidikan nasional, khususnya dunia persekolahan. Dengan melihat kondisi moralitas pendidikan di atas, H.A.R Tilaar menilai, secara umum, setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan perlunya dibangkitkan kembali pendidikan budi pekerti dalam pendidikan nasional. *Pertama*, melemahnya ikatan keluarga; *kedua*, kecenderungan negatif dalam kehidupan pemuda; *ketiga*, suatu kebangkitan kembali perlunya nilai-nilai etik (H.A.R. Tilaar, 1999: 74-75).

## **MENGEMAS PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH**

Sementara itu, muncul berbagai variasi pendapat tentang bagaimana mengemas pendidikan moral dalam dunia persekolahan. Sedikitnya ada dua pendapat dalam konteks ini. *Pertama*, pendapat yang berkaitan dengan efektivitas penerapan pendidikan moral di sekolah. *Kedua*, pendapat yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan pendidikan moral; apakah diintegrasikan dalam pendidikan agama atautkah diajarkan secara mandiri.

### **1. Efektivitas Pendidikan Moral: di Keluarga atau Masyarakat?**

Kemerosotan nilai-nilai moral yang melanda masyarakat kita saat ini tidak lepas dari tingkat keefektivan penanaman nilai-nilai budi pekerti, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Efektivitas pendidikan budi pekerti yang berlangsung di jenjang pendidikan formal hingga kini masih diperdebatkan. Pendapat yang berkembang, sekolah bukanlah tempat utama dalam transfer nilai-nilai moral. Kunci keberhasilan pendidikan moral terletak pada peran keluarga dan masyarakat. Pendapat demikian beralasan pada beberapa hal:

- a. Pendidikan moral yang “diajarkan” di sekolah baru menyentuh aspek-aspek kognitif (pengetahuan), belum pada aspek edukatif dan implementatif.
- b. Moral merupakan aktivitas watak yang selalu mengiringi kehidupan manusia, maka pendidikan moral menghendaki adanya kebiasaan yang istiqamah dari setiap individu pendidik dan peserta didik. Hal ini tidak bisa maksimal dilakukan di sekolah, karena justru bagian terbesar waktu peserta didik dan pendidik adalah di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- c. Kecenderungan peraturan sekolah yang tidak ketat terhadap pelanggaran tindak kekerasan dan amoral yang dilakukan oleh peserta didik yang berimplikasi pada pengabaian peraturan dan tata tertib sekolah oleh peserta didik.
- d. Lingkungan interaksi di sekolah tidak selektif. Peserta didik bebas bergaul dengan siapa saja, tanpa mempertimbangkan, apakah teman-temannya memiliki integritas moral atau tidak.

Persoalan-persoalan tersebut muncul, bermuara pada bergesernya pemahaman terhadap istilah pendidikan sekolah. Menurut Abdul Hasim (2000), makna pendidikan telah direduksi sedemikian rupa sehingga tidak berbeda dengan pengajaran. Padahal, pendidikan dan pengajaran memiliki wilayah garapan dan pencapaian berbeda. Pendidikan merupakan proses penyampaian nilai-nilai dan menuntut tumbuhnya budi pekerti yang adab, sedangkan pengajaran merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan untuk menuntut gerak pikiran serta melatih kecakapan peserta didik/siswa, yang terwujud dalam berbagai mata pelajaran atau bidang studi agar menjadi orang pandai, berpengetahuan dan cerdas. Dengan demikian, pengajaran lebih mengarah kepada *transfer of knowledge*. Oleh karena itu, budi pekerti atau moral niscayanya inklusif dalam proses pendidikan.

Penyederhanaan makna pendidikan, dilakukan bukan hanya oleh masyarakat awam pada umumnya, tetapi kalangan pendidik pun (baca: guru/dosen) mulai “meninggalkan” substansi makna mendidiknya. Para guru sering merasa telah cukup, ketika jam kewajiban mengajarnya dilaksanakan; urusan aspek afektif (emosional) dan konatif (pekerti) peserta didik yang menjadi dasar sarana infiltrasi nilai-nilai moral dianggap bukan urusannya.

Moral yang sering disinonimkan dengan akhlak atau budi pekerti sering diasumsikan sebagai dasar karakter seseorang. Moral atau budi pekerti yang

baik akan tercerminkan dalam sikap dan perilaku yang baik pula. Dengan demikian, proses pendidikan yang di dalamnya terkandung pengertian *building of character* sejatinya adalah juga pembentukan moral atau budi pekerti.

Kemudian, paradigma pendidikan moral di dunia persekolahan pada kenyataannya seringkali berbenturan dengan paradigma pendidikan lain yang lebih kuat, semisal paradigma *link and match*, yang mengedepankan pemberdayaan manusia pendidikan ke arah penguasaan ilmu dan teknologi canggih menuju era industrialisasi dan globalisasi, sehingga tanpa sadar pendidikan mengalami reduksi makna menjadi suatu proses yang lebih mementingkan tenaga kerja trampil, lulusan siap pakai dan sumberdaya berkualitas ketimbang lulusan (*out-put*) yang mempunyai budi pekerti (moral, watak, akhlak) mulia yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang beradab.

## **2. Pendidikan Moral Efektif di Sekolah**

Terlepas dari berbagai persoalan dan pendapat di atas, Emile Durkheim seorang tokoh pendidikan moral, justru menegaskan bahwa sekolah mempunyai fungsi yang sangat urgen dan misi khusus untuk menciptakan makhluk bermoral, yang dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu ia memusatkan sekolah sebagai titik sentral pendidikan moral. Menurutnya, seharusnya sekolah—sebagai roda penggerak pendidikan nasional—diberi peranan besar dalam pembinaan dan perkembangan moral anak. Bila tidak demikian, dapat menyebabkan aspek kebudayaan, sesuatu yang sangat penting akan hilang (Emile Durkheim, tt.:14). Dalam hal ini Durkheim beralasan:

*Pertama*, meskipun keluarga merupakan tempat yang paling tepat dan efektif dalam membangkitkan dan mengatur perasaan-perasaan mendasar yang sederhana dan merupakan dasar moralitas, dan lebih umum lagi perasaan-perasaan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan pribadi yang paling sederhana, namun keluarga bukanlah lembaga yang didirikan dengan tujuan mendidik anak untuk dapat memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat.

*Kedua*, tahap sekolah (khususnya SD) adalah tahap di mana anak mulai meninggalkan lingkungan keluarganya dan memasuki lingkungan yang lebih luas. Tahap ini sejatinya adalah saat kritis dalam pembentukan sikap moral. Karena, sebelum tahap tersebut anak masih terlampau muda, perkembangan intelektualnya masih labil. Kehidupan emosionalnya masih terlalu sederhana

dan belum berkembang. Ia belum memiliki dasar intelektual yang diperlukan untuk dapat memahami gagasan-gagasan dan perasaan-perasaan yang cukup kompleks yang mendasari moralitas. Oleh karena itu pada tahap inilah anak mulai diberikan pendidikan moral, walaupun materi yang diberikan masih bersifat umum. Sebaliknya, bila tahap kedua (usia sekolah SD) berlalu tanpa meletakkan dasar-dasar moralitas, maka dasar-dasar moralitas itu tidak akan pernah tertanam dalam diri anak (Emile Durkheim, tt.: 13-14).

Berdasarkan pendapat Durkheim di atas, pendidikan moral bukanlah diberikan dalam lingkungan keluarga dan taman kanak-kanak, karena pertimbangan usia anak yang belum matang secara intelektual dan emosional, tetapi pendidikan moral hendaklah dipusatkan sejak anak memasuki sekolah dasar (SD). Apalagi pada tahap tersebut merupakan tahap antara usia kanak-kanak dan dewasa.

Dalam implementasinya, pendidikan moral—dengan pemahaman sebagai pendidikan perilaku yang menuntut keteladanan— di sekolah akan efektif jika terdapat adanya model dan keistiqomahan dari para pendidik. Sikap dan perilaku pendidik sebagai cermin budi pekertinya tidak mungkin untuk dikamufase. Mengingat, harga yang harus dibayar terlalu mahal.

Dengan kata lain, pendidikan moral menuntut kejujuran para pendidik. Kejujuran para penyelenggara pendidikan —khususnya guru/dosen— sejatinya merupakan proses penyampaian nilai moral yang paling efektif, sebab kejujuran merupakan pangkal kebenaran dan kebajikan yang merupakan esensi nilai moral. Dengan demikian, kejujuran para pendidik akan sangat bermakna bagi para peserta didik. Jika para pendidik melakukannya, maka proses pendidikan moral atau budi pekerti sudah dimulai dan insya Allah akan berhasil dengan baik.

### **3. Kemandirian Pendidikan Moral di Sekolah**

Ketika keharusan pendidikan moral telah disepakati pelaksanaannya di dunia persekolahan, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana teknis pelaksanaannya? Terpisah secara mandiri, ataukah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, khususnya pendidikan agama ?

Pendapat yang menghendaki pengajaran pendidikan moral diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, khususnya pendidikan agama beralasan karena muatan moral dan agama saling bersinergi. Tujuan pendidikan agama dan



moral sebenarnya tidak terlalu berbeda, yaitu dalam kerangka menghasilkan manusia pendidikan yang berkepribadian, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, arif bijaksana dan berkepedulian sosial tinggi. Agama adalah sumber moral. Pembinaan moral sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan agama diasumsikan dapat menjadi sarana ampuh dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif baik yang internal maupun eksternal.

Sementara itu, pendapat yang mengatakan pendidikan moral harus diajarkan secara mandiri beralasan kepada: (1) Implementasi pendidikan agama yang ada selama ini hanya mendapat bobot jam pelajaran amat minim (hanya dua jam/minggu) dan (2) Materi pendidikan moral yang diintegrasikan kepada materi pendidikan agama seringkali terdesak oleh materi-materi lain pendidikan agama, semisal akidah/teologi, hukum, sejarah, dan sebagainya.

Sebenarnya, perbedaan tersebut dapat dikompromikan dengan menarik benang merah bahwa wilayah pendidikan moral ini dapat saja dijadikan mata ajar tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti agama, bahasa, sejarah dan sebagainya. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah substansi moral ada dalam semua mata pelajaran. Tinggal bagaimana guru mengemasnya sehingga dimensi moral dapat dihadirkan secara seimbang kepada anak di samping dimensi intelektual.

Guru di samping sebagai transformator pengajaran juga berperan dalam dimensi yang lebih luas yakni membimbing dan membina pribadi peserta didik sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Jadi, diharapkan hasil pendidikan yang sejati tentunya tidak ditakar semata-mata berdasarkan angka-angka, tetapi juga dari integritas moral dan kepribadian peserta didik.

Dengan demikian, perdebatan mengenai apakah budi pekerti dijadikan mata pelajaran tersendiri atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran agama, tidaklah terlalu penting. Yang penting justru, para pendidik (guru/dosen) harus mampu “menyusupkan” nilai-nilai moral kepada anak didik pada setiap sikap dan perilakunya, termasuk tentunya ketika mereka mengajar dan mendidik di kelas.

## **SIMPULAN**

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat urgen dan misi khusus untuk menciptakan makhluk bermoral, yang dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, sekolah merupakan titik sentral pendidikan moral. Seharusnya sekolah –sebagai roda penggerak pendidikan nasional— diberi peranan besar dalam pembinaan dan perkembangan moral anak. Bila tidak demikian, dapat menyebabkan aspek kebudayaan, sesuatu yang sangat penting akan hilang

Meskipun keluarga merupakan tempat yang paling tepat dan efektif dalam membangkitkan dan mengatur perasaan-perasaan mendasar yang sederhana dan merupakan dasar moralitas, dan lebih umum lagi perasaan-perasaan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan pribadi yang paling sederhana, namun keluarga bukanlah lembaga yang didirikan dengan tujuan mendidik anak untuk dapat memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat.

Tahap sekolah (khususnya SD) adalah tahap di mana anak mulai meninggalkan lingkungan keluarganya dan memasuki lingkungan yang lebih luas. Tahap ini sejatinya adalah saat kritis dalam pembentukan sikap moral. Karena, sebelum tahap tersebut anak masih terlampau muda, perkembangan intelektualnya masih labil. Kehidupan emosionalnya masih terlalu sederhana dan belum berkembang. Ia belum memiliki dasar intelektual yang diperlukan untuk dapat memahami gagasan-gagasan dan perasaan-perasaan yang cukup kompleks yang mendasari moralitas. Oleh karena itu pada tahap inilah anak mulai diberikan pendidikan moral, walaupun materi yang diberikan masih bersifat umum. Sebaliknya, bila tahap kedua (usia sekolah SD) berlalu tanpa meletakkan dasar-dasar moralitas, maka dasar-dasar moralitas itu tidak akan pernah tertanam dalam diri anak.

Dalam implementasinya, pendidikan moral –dengan pemahaman sebagai pendidikan perilaku yang menuntut keteladanan— di sekolah akan efektif jika terdapat adanya model dan keistiqamahan dari para pendidik. Sikap dan perilaku pendidik sebagai cermin budi pekertinya tidak mungkin untuk dikamufilase. Mengingat, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Dengan kata lain, pendidikan moral menuntut kejujuran para pendidik. Kejujuran para penyelenggara pendidikan —khususnya guru/dosen— sejatinya merupakan proses penyampaian nilai moral yang paling efektif, sebab kejujuran merupakan pangkal kebenaran dan kebajikan yang merupakan esensi nilai moral.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ghazali, Imam. tt. *Ihya Ulum al-Din*. Juz ke-1 Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Durkheim, Emile. tt. *Pengantar Pendidikan Moral*. Jakarta: Erlangga.
- Hasim, Abdul. 2000. "*Pendidikan dalam Dimensi Moral*". Media Indonesia: Januari.
- Kurniawan, Khaerudin. 1999. "*Paradigma Baru Pendidikan Moral*". Suara Pembaruan: Maret.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rajab, Mansyur Ali. 1961. *Ta'amulat fi falsafati al-Akhlaq*. Mesir: Maktabah Injalu.
- Syaukani, HR. 2006. *Pendidikan Paspur Masa Depan: Prioritas Pembangunan dalam Otonomi Daerah*. (ed.) Ahmad Ta'rifin. Jakarta: Nuansa Madani.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia; Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Cita Umbara.
- Ya'kub, Hamzah. 1983. *Etika Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.